

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (*stakeholders*). Freeman (1984) menjelaskan bahwa keberlangsungan perusahaan bergantung pada kemampuan dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder*, karena aktivitas perusahaan dapat berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan..

Stakeholder Theory pertama kali dikemukakan oleh Freeman (1984) yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai:

“setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.”

Dalam perkembangan literatur modern, *Stakeholder Theory* dipahami sebagai pendekatan strategis yang menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga pada

kemampuannya membangun hubungan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder*. Freeman et al. (2021) menjelaskan bahwa teori ini menekankan pentingnya keberlanjutan, kerja sama, dan pengelolaan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan *stakeholder*. Dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan legitimasi, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi keberlangsungan perusahaan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa tekanan *stakeholder* berpengaruh terhadap praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Perusahaan yang menghadapi tekanan dari investor, regulator, dan masyarakat cenderung meningkatkan kualitas *Carbon Emission Disclosure* sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi (Widarjo et al., 2024). Pada sektor pertambangan, tekanan *stakeholder* juga terbukti meningkatkan praktik pengungkapan lingkungan guna menjaga dukungan sosial dan legitimasi operasional (Wicaksono, 2024).

Selain itu, dalam konteks struktur kepemilikan, investor asing dipandang sebagai *stakeholder* strategis yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Kepemilikan asing terbukti mendorong peningkatan kualitas pengungkapan ESG karena investor global menuntut transparansi dan praktik keberlanjutan yang lebih tinggi (Nguyen et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan modal asing dapat memperkuat hubungan antara praktik akuntansi lingkungan dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan perspektif *Stakeholder Theory*, perusahaan yang mampu memenuhi ekspektasi *stakeholder* melalui penerapan *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan tanggung jawab lingkungan. Pemenuhan kebutuhan informasi *stakeholder* dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat reputasi perusahaan, serta memberikan dukungan bagi keberlangsungan usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat risiko lingkungan tinggi (Freeman et al., 2021).

Menurut perspektif *Stakeholder Theory*, *stakeholder* dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua kelompok, yaitu:

1. *Internal stakeholders*, yang meliputi pemegang saham, manajemen, dan karyawan yang secara langsung terlibat dalam operasional perusahaan serta memiliki kepentingan ekonomi terhadap kinerja perusahaan.
2. *External stakeholders*, yang mencakup pemerintah, masyarakat, pelanggan, pemasok, serta investor eksternal termasuk pemegang saham asing yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan.

Dengan demikian, *Stakeholder Theory* memberikan landasan teoritis yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, kepemilikan modal asing, dan profitabilitas perusahaan. Teori ini sesuai digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga perlu memenuhi tuntutan *stakeholder* melalui pengelolaan lingkungan, transparansi

informasi, dan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat mendukung keberlanjutan dan kinerja perusahaan (Freeman, 1984; Freeman et al., 2021).

2.1.2 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam suatu sistem sosial yang memiliki norma, nilai, dan harapan masyarakat yang perlu diperhatikan agar keberadaan perusahaan tetap dapat diterima. Legitimasi diperoleh ketika aktivitas perusahaan dipandang sesuai dengan nilai dan keyakinan sosial yang berlaku, sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutan operasionalnya dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui aktivitas yang sesuai dengan harapan *stakeholder* (Dowling & Pfeffer, 1975).

Legitimacy Theory pertama kali dikembangkan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang menyatakan bahwa:

“organisasi berusaha menciptakan kesesuaian antara nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dengan nilai dan aktivitas organisasi itu sendiri.”

Dalam perkembangan literatur modern, *Legitimacy Theory* dipahami sebagai mekanisme yang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi non-keuangan, khususnya terkait lingkungan dan keberlanjutan, sebagai upaya mempertahankan legitimasi sosial. Perusahaan yang gagal memenuhi ekspektasi masyarakat berpotensi kehilangan legitimasi, yang dapat

berdampak pada penurunan kepercayaan publik, meningkatnya tekanan regulasi, hingga gangguan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan (Suchman, 1995; Akhter et al., 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa tekanan legitimasi mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan yang berada pada sektor dengan tingkat dampak lingkungan tinggi, seperti pertambangan, cenderung melakukan *Carbon Emission Disclosure* dan menerapkan *Green Accounting* sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial, regulasi lingkungan, serta upaya mempertahankan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan (Akhter et al., 2023; Widarjo et al., 2024).

Selain itu, pengungkapan informasi lingkungan juga berfungsi sebagai strategi legitimasi untuk menjaga citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Perusahaan yang mampu menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mengungkapkan emisi karbon secara transparan cenderung memperoleh legitimasi yang lebih kuat, sehingga dapat mempertahankan keberlanjutan operasional serta meningkatkan kepercayaan investor (Sari & Nugroho, 2024).

Dalam konteks kepemilikan, investor asing juga memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan untuk menjaga legitimasi. Kepemilikan modal asing sering kali membawa standar internasional yang lebih ketat terkait lingkungan dan keberlanjutan, sehingga perusahaan terdorong untuk

meningkatkan praktik pengungkapan lingkungan agar tetap memperoleh legitimasi dari investor global. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dari kepemilikan asing tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat tuntutan legitimasi sosial dan lingkungan perusahaan (Nguyen et al., 2023).

Berdasarkan perspektif *Legitimacy Theory*, perusahaan yang mampu menyesuaikan aktivitas operasionalnya dengan nilai-nilai sosial serta memenuhi ekspektasi lingkungan melalui penerapan *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* akan lebih mudah memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Legitimasi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta berdampak pada peningkatan Profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA), khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat sensitivitas lingkungan yang tinggi.

Menurut Suchman (1995), legitimasi dapat dipahami dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. *Pragmatic legitimacy*, yaitu legitimasi yang diperoleh karena perusahaan mampu memenuhi kepentingan langsung pemangku kepentingan seperti investor dan masyarakat melalui kinerja ekonomi dan tanggung jawab sosial.
2. *Moral legitimacy*, yaitu legitimasi yang diperoleh berdasarkan penilaian etis terhadap aktivitas perusahaan, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan praktik keberlanjutan.

3. *Cognitive legitimacy*, yaitu legitimasi yang muncul karena aktivitas perusahaan dianggap wajar dan sesuai dengan norma yang telah diterima secara umum dalam masyarakat.

Dengan demikian, *Legitimacy Theory* memberikan landasan teoritis yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, *Firm Size*, dan profitabilitas (*ROA*). Teori ini sesuai digunakan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan memiliki aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sehingga perlu memperoleh dan mempertahankan legitimasi melalui pengelolaan lingkungan, pengungkapan informasi yang transparan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, keberadaan kepemilikan modal asing dapat meningkatkan tuntutan legitimasi melalui dorongan terhadap transparansi dan praktik keberlanjutan perusahaan (Dowling & Pfeffer, 1975).

2.1.3 *Green Accounting*

2.1.3.1 Definisi *Green Accounting*

Green Accounting atau akuntansi hijau merupakan konsep akuntansi yang berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, aspek lingkungan diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi melalui pengidentifikasian, pengukuran, dan penyajian

informasi lingkungan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan pelaporan perusahaan (Khomsiyah et al., 2023).

Menurut Husnatarina (2024:15) ,*Green Accounting* merupakan proses akuntansi yang mencakup identifikasi, pengukuran, dan pelaporan biaya serta dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Penerapan *Green Accounting* tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mengintegrasikan informasi lingkungan sebagai bentuk transparansi perusahaan dalam mengelola dampak aktivitas operasionalnya serta mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ginting (2025:15) dalam buku Akuntansi hijau menjelaskan bahwa:

“*Green Accounting* merupakan konsep akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pencatatan dan pelaporan perusahaan sehingga informasi yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan kinerja keuangan, tetapi juga kinerja lingkungan organisasi”

Dalam kajian empiris, Rofizar (2024) menyatakan bahwa *Green Accounting* merupakan praktik akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat lingkungan dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, Ayu dan Abdullah (2025) menjelaskan bahwa *Green Accounting* berfungsi dalam mengidentifikasi dan mengukur biaya lingkungan sebagai bagian dari informasi akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Sementara itu, Permata dan Astuti (2025) menegaskan bahwa *Green Accounting*

merupakan pendekatan yang membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan melalui pengungkapan informasi lingkungan secara sistematis guna mendukung keberlanjutan bisnis.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Green Accounting* merupakan sistem akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan aktivitas perusahaan. Penerapan konsep ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab lingkungan perusahaan, tetapi juga menyediakan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan serta keberlanjutan kinerja perusahaan (Husnatarina, 2024; Ginting, 2025).

2.1.3.2 Tujuan *Green Accounting*

Penerapan *Green Accounting* dalam perusahaan bertujuan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi sehingga aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui penerapan konsep ini, perusahaan dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan informasi terkait biaya serta aktivitas lingkungan secara lebih transparan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang mendukung keberlanjutan perusahaan (Husnatarina, 2024; Khomsiyah et al., 2023).

Menurut Husnatarina (2024:7) dalam buku Pengantar Akuntansi Lingkungan, penerapan *Green Accounting* memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengukur biaya serta dampak lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan.
2. Menyediakan informasi lingkungan yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam serta pengendalian biaya lingkungan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan melalui pelaporan informasi lingkungan.
5. Mendukung terciptanya keberlanjutan usaha dengan menyeimbangkan kinerja ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

2.1.3.3 Fungsi dan Peran *Green Accounting*

Green Accounting tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan biaya lingkungan, tetapi juga berperan dalam mendukung pengelolaan dan penyampaian informasi lingkungan perusahaan. Melalui penerapan *Green Accounting*, perusahaan dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan (Khomsiyah et al., 2023).

Menurut Maimanah et al. (2023) dalam jurnal *Urgensi Pentingnya Green Accounting di Indonesia*, fungsi *Green Accounting* terdiri dari:

1. Proses Internal

Sebagai bagian integral dari sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal dapat membantu melacak pengeluaran upaya konservasi, membandingkan pengeluaran tersebut dengan manfaatnya, dan menemukan cara untuk membuat upaya konservasi lebih efisien dan efektif. Sebagai alat manajemen, akuntansi lingkungan dapat digunakan oleh para manajer dan divisi bisnis yang terkait.

2. Tujuan Eksternal

Sebuah organisasi dapat mempengaruhi pilihan para pemangku kepentingannya-termasuk pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat-melalui fungsi eksternal dengan membagikan hasil pengukuran kuantitatif dari upaya konservasi lingkungan. Menerbitkan akuntansi lingkungan harus memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pemangku kepentingan dan digunakan untuk menilai upaya konservasi lingkungan. Pada akhirnya, akuntansi lingkungan berusaha untuk meningkatkan kuantitas informasi yang berguna yang dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Bagaimana perusahaan mengkategorikan biaya-biaya yang dikeluarkannya tidak relevan dengan kemampuan akuntansi lingkungan.

Sedangkan peran dari *Green Accounting* menurut Lako dan Sumaryati (2021:38) adalah sebagai berikut:

“*Green Accounting* berperan penting bagi pihak manajemen dan karyawan dalam penilaian kinerja dan pengambilan keputusan manajerial, serta pengambilan tindakan-tindakan operasional untuk mendorong korporasi semakin meningkatkan kinerja dan nilainya. Informasi *Green Accounting*

juga berperan penting dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta menjadi “bahasa komunikasi” yang efektif untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran manajemen dan pihak terkait tentang kepedulian lingkungan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan lingkungan”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Green Accounting* merupakan pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan melalui proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi lingkungan. Penerapan *Green Accounting* tidak hanya mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga membantu meningkatkan transparansi, mendukung pengambilan keputusan manajemen, serta mendorong terciptanya keberlanjutan kinerja perusahaan (Khomsiyah et al., 2023).

2.1.3.4 Peraturan terkait *Green Accounting*

Menurut Junaedi et al., (2023:7) terdapat beberapa peraturan terkait dengan *Green Accounting* sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengatur tentang kewajiban setiap orang yang berhubungan dengan atau melakukan kegiatan untuk memelihara, mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan akurat tentang lingkungan hidup Akibat hukum atas pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga telah ditetapkan.
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU ini mengatur kewajiban setiap penanam modal yang berbentuk badan

hukum atau badan hukum untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga lingkungan, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar. Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, larangan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal.

3. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mewajibkan perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam untuk memasukan perhitungan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan secara memadai dan wajar. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. UU ini mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang memuat Tata Kelola Perusahaan yang menggambarkan kegiatan dan biaya yang dikeluarkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penetapan Peringkat Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum. Dalam aturan ini aspek lingkungan menjadi salah satu syarat dalam pemberian kredit. Setiap perusahaan yang ingin memperoleh kredit perbankan, harus menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan. Standar pengukur kualitas limbah perusahaan yang digunakan adalah PROPER. Dengan menggunakan lima peringkat (hitam, merah, biru, hijau, dan emas) perusahaan akan diurutkan berdasarkan keberhasilan mereka dalam pengelolaan limbahnya”.

2.1.3.5 Penerapan *Green Accounting* pada Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan industri yang memiliki risiko dampak lingkungan yang tinggi sehingga penerapan *Green Accounting* menjadi penting sebagai bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Melalui akuntansi hijau, perusahaan dapat mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas operasional dan pelaporan perusahaan untuk meningkatkan transparansi informasi lingkungan serta mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan (Ginting, 2025).

Menurut Ginting (2025), terdapat beberapa hal pokok yang berkaitan dengan penerapan akuntansi hijau pada sektor pertambangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelacakan Biaya Lingkungan

Perusahaan pertambangan menggunakan akuntansi hijau untuk mengidentifikasi dan mengukur biaya yang berkaitan dengan degradasi

lingkungan, seperti rehabilitasi lahan pascatambang, pengendalian polusi, serta pengelolaan limbah hasil kegiatan operasional.

2. Pelaporan Keberlanjutan

Penerapan *Green Accounting* membantu perusahaan mengungkapkan kinerja lingkungan dan upaya keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan

Akuntansi hijau memastikan perusahaan pertambangan mematuhi regulasi lingkungan melalui pencatatan biaya kepatuhan dan potensi denda lingkungan.

4. Manajemen Sumber Daya Alam

Dengan memperhitungkan penipisan sumber daya alam, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pemanfaatan dan konservasi sumber daya.

5. Membangun Citra Perusahaan

Penerapan akuntansi hijau dapat meningkatkan reputasi perusahaan karena menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab.

2.1.3.6 Biaya Lingkungan Sebagai Representasi *Green Accounting*

a. Definisi Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan (*environmental cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai konsekuensi dari aktivitas operasional yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pengendalian, pengurangan, maupun pemulihan dampak lingkungan. Menurut Lako (2018), biaya lingkungan adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dialokasikan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari penerapan *Green Accounting*. Pengakuan biaya lingkungan bertujuan agar seluruh dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dicatat, dan dilaporkan secara memadai dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan.

b. Jenis-Jenis Biaya Lingkungan

Menurut Lako (2018), biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan, dan memulihkan dampak lingkungan akibat aktivitas operasional. Pada perusahaan pertambangan, biaya lingkungan umumnya terdiri atas beberapa jenis berikut.

1. **Biaya reklamasi lahan** merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya setelah kegiatan pertambangan selesai

2. **Biaya pascatambang** merupakan biaya yang digunakan untuk kegiatan penutupan tambang, pemulihan fungsi lingkungan, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan setelah seluruh kegiatan pertambangan berakhir.
3. **Biaya rehabilitasi lingkungan** merupakan biaya yang dialokasikan perusahaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas operasional sehingga kondisi lingkungan dapat kembali mendekati keadaan semula.
4. **Biaya pengelolaan limbah** merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah, mengurangi, memanfaatkan kembali, atau membuang limbah hasil kegiatan operasional agar memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
5. **Biaya pengendalian pencemaran** merupakan biaya yang digunakan perusahaan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran udara, air, maupun tanah melalui penyediaan fasilitas dan teknologi pengendalian pencemaran.
6. **Biaya pemantauan kualitas lingkungan** merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan pengukuran, pengawasan, serta evaluasi secara berkala terhadap kualitas air, udara, tanah, maupun aspek lingkungan lainnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
7. **Biaya konservasi lingkungan** merupakan biaya yang dialokasikan perusahaan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan

keanekaragaman hayati melalui kegiatan pelestarian, penghijauan, maupun perlindungan ekosistem di sekitar wilayah operasional perusahaan.

c. Hubungan Biaya Lingkungan dengan *Green Accounting*

Biaya lingkungan merupakan salah satu komponen utama dalam penerapan *Green Accounting* karena mencerminkan sejauh mana perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan bisnis. Melalui pengakuan dan pencatatan biaya lingkungan, perusahaan dapat mengetahui besarnya pengeluaran yang dialokasikan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efisiensi pengelolaan lingkungan maupun pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, penerapan *Green Accounting* tidak hanya berorientasi pada pelaporan keuangan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dalam setiap aktivitas operasionalnya (Lako, 2018).

2.1.3.7 Laba Bersih sebagai Komponen Pengukuran *Green Accounting*

a. Definisi Laba

Laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan seluruh biaya dan beban yang dikeluarkan selama satu periode akuntansi. Laba menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Menurut Kasmir (2023), laba merupakan hasil yang diperoleh perusahaan setelah pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya yang timbul selama kegiatan usaha dalam suatu periode tertentu. Sementara itu, Harahap (2022) menyatakan bahwa

“laba adalah kelebihan pendapatan atas seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan selama satu periode akuntansi, yang menunjukkan hasil akhir dari aktivitas ekonomi perusahaan.”

Dengan demikian, laba dapat diartikan sebagai ukuran kinerja keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan melalui kegiatan operasionalnya.

b. Jenis-Jenis Laba

1. **Laba Kotor (Gross Profit)** merupakan selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan (HPP), yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualan sebelum dikurangi beban operasional.
2. **Laba Operasi (Operating Profit)** merupakan laba yang diperoleh setelah laba kotor dikurangi seluruh beban operasional perusahaan. Laba ini menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional utamanya.
3. **Laba Sebelum Pajak (Earnings Before Tax)** merupakan laba yang diperoleh setelah memperhitungkan seluruh pendapatan dan beban perusahaan sebelum dikurangi beban pajak penghasilan.

4. **Laba Bersih (Net Income)** merupakan laba yang diperoleh perusahaan setelah seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban operasional, beban nonoperasional, beban bunga, dan pajak. Laba bersih mencerminkan hasil akhir kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi dan menjadi indikator utama dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.

c. **Laba Bersih sebagai Dasar Perbandingan Biaya Lingkungan**

Laba bersih digunakan sebagai dasar perbandingan biaya lingkungan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah seluruh beban diperhitungkan. Perbandingan biaya lingkungan terhadap laba bersih menunjukkan proporsi laba yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan laba bersih sebagai pembanding dinilai mampu menggambarkan tingkat komitmen perusahaan dalam menerapkan *Green Accounting* secara lebih proporsional (Putri & Khomsiyah, 2022).

2.1.3.8 Penggunaan Biaya Lingkungan terhadap Laba Bersih sebagai Representasi *Green Accounting*

Green Accounting tidak hanya menekankan pada pengakuan dan pencatatan biaya lingkungan, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk mendukung kegiatan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran *Green Accounting* perlu mempertimbangkan biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan serta

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebagai sumber pendanaan kegiatan tersebut (Lako, 2018).

Biaya lingkungan yang dibandingkan dengan laba bersih dapat menunjukkan proporsi keuntungan yang dialokasikan perusahaan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Penggunaan laba bersih sebagai dasar perbandingan bertujuan agar besarnya biaya lingkungan dapat dinilai secara lebih proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing perusahaan. Dengan demikian, hasil pengukuran tidak hanya mencerminkan besarnya biaya yang dikeluarkan, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan (Kasmir, 2023).

Dalam penelitian ini, rasio biaya lingkungan terhadap laba bersih digunakan sebagai representasi *Green Accounting* karena mampu menggambarkan besarnya alokasi biaya lingkungan dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Rasio tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam aktivitas operasionalnya melalui pengalokasian sumber daya ekonomi untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan rasio biaya lingkungan terhadap laba bersih dinilai sesuai untuk mengukur implementasi *Green Accounting*, sebagaimana digunakan dalam penelitian Putri dan Khomsiyah (2022).

2.1.4 *Carbon Emission Disclosure*

2.1.4.1 Definisi *Carbon Emission Disclosure*

Carbon Emission Disclosure atau pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk pengungkapan informasi lingkungan yang berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim akibat aktivitas operasional perusahaan. Konsep ini menekankan transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait emisi karbon yang dihasilkan serta upaya pengelolaan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Pengungkapan tersebut juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dan memenuhi tuntutan informasi dari para pemangku kepentingan (Sunarto, 2024).

Terdapat beberapa definisi yang menjelaskan konsep *Carbon Emission Disclosure*. Menurut Sunarto et al. (2024):

“Pengungkapan emisi karbon adalah langkah yang diambil perusahaan untuk mencatat, mengenali, mengukur, dan menyampaikan informasi mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkan.”

Konsep *Carbon Emission Disclosure* juga dipahami sebagai pengungkapan informasi yang mencakup intensitas emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, tata kelola perusahaan, serta strategi dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca merupakan gas yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama dari kegiatan operasional perusahaan, yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan pemanasan global (Mohammad Nasih et al., 2024).

Selain itu, *Carbon Emission Disclosure* dipandang sebagai pengungkapan informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terkait jumlah emisi karbon, sumber emisi, serta kebijakan dan program perusahaan dalam menurunkan dampak emisi karbon. Pengungkapan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan transparansi informasi, serta memberikan gambaran kepada *stakeholder* mengenai upaya perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim (Rizki Aulia et al., 2021).

Pandangan lain menyatakan bahwa *Carbon Emission Disclosure* merupakan penyampaian informasi oleh perusahaan mengenai aktivitas pengelolaan dan pengurangan emisi karbon yang dilakukan guna meminimalkan dampak lingkungan serta meningkatkan kepercayaan *stakeholder* (Hadiwibowo et al., 2023). Praktik ini juga dipahami sebagai pelaporan yang memuat informasi emisi gas rumah kaca, kebijakan lingkungan, serta strategi perusahaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim melalui laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan (Lestari et al., 2024).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Carbon Emission Disclosure* merupakan pengungkapan informasi perusahaan mengenai jumlah emisi karbon, sumber emisi, kebijakan pengelolaan lingkungan, serta upaya pengurangan emisi yang disampaikan melalui laporan perusahaan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder*. Pengungkapan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan

serta mendukung keberlanjutan perusahaan (Sunarto, 2022; Rizki Aulia et al., 2021).

2.1.4.2 Pentingnya *Carbon Emission Disclosure*

Carbon Emission Disclosure menjadi aspek yang semakin penting dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan seiring meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim dan dampak aktivitas industri terhadap lingkungan. Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait risiko perubahan iklim serta upaya pengelolaan emisi kepada para pemangku kepentingan (Rizki Aulia et al., 2021).

Adapun pentingnya pengungkapan emisi karbon dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi

Berbagai negara telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengendalian perubahan iklim, seperti kewajiban pelaporan emisi karbon oleh perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membantu perusahaan menghindari potensi sanksi dan risiko hukum di masa mendatang

2. Meningkatkan Kepercayaan dan Hubungan Investor

Investor semakin mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang mengungkapkan informasi emisi karbon secara transparan dinilai memiliki

tata kelola yang lebih baik sehingga berpotensi menarik investor dan menurunkan biaya modal.

3. Meningkatkan Persepsi Publik dan Reputasi Perusahaan

Transparansi dalam pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. *Stakeholder* cenderung memberikan kepercayaan lebih kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam mengurangi dampak lingkungan, sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif.

4. Mendukung Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja Lingkungan

Pengungkapan emisi karbon mendorong perusahaan untuk melakukan pengumpulan dan pengukuran data emisi secara sistematis, baik emisi langsung maupun tidak langsung, sehingga membantu manajemen dalam mengendalikan penggunaan energi dan dampak lingkungan.

5. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Carbon Emission Disclosure bukan merupakan aktivitas satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang memungkinkan perusahaan menetapkan target pengurangan emisi, mengevaluasi kinerja lingkungan, serta menyesuaikan strategi bisnis dengan tuntutan keberlanjutan.

2.1.4.3 Item Pengungkapan Emisi Karbon sebagai Representasi *Carbon Emission Disclosure*

Menurut Guo (2022), *Carbon Emission Disclosure* diukur melalui beberapa aspek yang menggambarkan tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon dan pengelolaan lingkungan.

Aspek-aspek tersebut meliputi:

a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penyampaian informasi keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan. Dalam *Carbon Emission Disclosure*, aspek CSR diukur melalui satu item, yaitu penerbitan laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengungkapan laporan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan secara sukarela maupun wajib menyampaikan informasi mengenai kinerja lingkungan, termasuk upaya pengelolaan emisi karbon sebagai bentuk akuntabilitas kepada *stakeholder* (Guo, 2022).

b. Risk

Aspek Risk menggambarkan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan risiko lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional. Aspek ini terdiri atas dua item, yaitu:

1. **Pengungkapan denda terkait pencemaran lingkungan**, yaitu informasi mengenai sanksi administratif atau denda yang diterima perusahaan akibat pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Pengungkapan ini menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.
2. **Pengungkapan litigasi terkait pencemaran lingkungan**, yaitu informasi mengenai sengketa hukum atau proses peradilan yang dihadapi perusahaan akibat dampak pencemaran lingkungan. Informasi

tersebut memberikan gambaran mengenai risiko hukum yang dihadapi perusahaan sebagai konsekuensi dari aktivitas operasionalnya.

c. *Strategy*

Aspek *Strategy* menunjukkan strategi perusahaan dalam mengurangi emisi karbon serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Aspek ini terdiri atas tiga item, yaitu:

1. **Rencana pengurangan emisi dan targetnya**, yaitu informasi mengenai kebijakan, sasaran, maupun target perusahaan dalam menurunkan emisi karbon yang dihasilkan selama kegiatan operasional.
2. **Sistem manajemen dan institusi terkait pengurangan emisi**, yaitu informasi mengenai pembentukan sistem, unit kerja, atau struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan emisi karbon di perusahaan.
3. **Pelatihan, peningkatan kesadaran, dan tindakan lingkungan**, yaitu informasi mengenai pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, maupun program peningkatan kesadaran lingkungan bagi karyawan sebagai upaya mendukung pengurangan emisi karbon.

d. *Governance*

Aspek *Governance* menggambarkan tata kelola perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan. Aspek ini terdiri atas empat item, yaitu:

1. **Pengungkapan tiga jenis limbah**, yaitu informasi mengenai limbah cair, limbah padat, dan gas buang yang dihasilkan perusahaan selama proses operasional.

2. **Pengolahan, daur ulang, dan pemanfaatan limbah**, yaitu informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam mengolah limbah agar dapat digunakan kembali atau dibuang sesuai ketentuan lingkungan.
3. **Operasi dan renovasi fasilitas perlindungan lingkungan**, yaitu informasi mengenai pembangunan, pengoperasian, maupun peningkatan fasilitas yang digunakan untuk mendukung perlindungan lingkungan.
4. **Investasi modal lingkungan, penelitian, dan inovasi**, yaitu informasi mengenai investasi perusahaan pada teknologi, penelitian, maupun inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan menurunkan emisi karbon.

e. *Accounting*

Aspek *Accounting* menunjukkan pengungkapan informasi kuantitatif mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan. Aspek ini terdiri atas tiga item, yaitu:

1. **Pengungkapan emisi gas rumah kaca**, yaitu informasi mengenai jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan selama satu periode pelaporan
2. **Pengungkapan pembuangan air limbah**, yaitu informasi mengenai jumlah maupun pengelolaan air limbah yang dihasilkan perusahaan sebelum dibuang ke lingkungan
3. **Pengungkapan emisi padat atau polutan lainnya**, yaitu informasi mengenai limbah padat maupun polutan lain yang dihasilkan perusahaan sebagai dampak dari aktivitas operasionalnya

f. Performance and Subsidies

Aspek *Performance and Subsidies* menunjukkan pencapaian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Aspek ini terdiri atas tiga item, yaitu:

1. **Manfaat ekonomi dari pengurangan emisi**, yaitu informasi mengenai keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan sebagai hasil dari program efisiensi energi atau pengurangan emisi karbon.
2. **Penghargaan terkait perlindungan lingkungan**, yaitu informasi mengenai penghargaan yang diterima perusahaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan.
3. **Bonus atau subsidi lingkungan**, yaitu informasi mengenai bantuan, insentif, atau subsidi yang diterima perusahaan dari pemerintah maupun pihak lain sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan perlindungan lingkungan.

g. Validation/Authentication

Aspek *Validation/Authentication* menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas informasi lingkungan yang diungkapkan. Aspek ini terdiri atas dua item, yaitu:

1. **Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001**, yaitu informasi mengenai kepemilikan sertifikasi ISO 14001 sebagai bukti bahwa perusahaan telah menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai standar internasional.
2. **Pemeriksaan oleh organisasi pihak ketiga independen**, yaitu informasi mengenai verifikasi atau *assurance* atas pengungkapan

lingkungan yang dilakukan oleh lembaga independen sehingga meningkatkan keandalan informasi yang disampaikan perusahaan.

2.1.4.4 *Carbon Emission Disclosure Index* sebagai Dasar Pengukuran

Carbon Emission Disclosure

Pengukuran *Carbon Emission Disclosure* umumnya dilakukan menggunakan *Carbon Emission Disclosure Index* (CEDI), yaitu suatu indeks yang mengukur tingkat kelengkapan pengungkapan informasi emisi karbon berdasarkan sejumlah item yang telah ditentukan. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan emisi karbon dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan (Guo, 2022).

Carbon Emission Disclosure Index disusun berdasarkan metode *checklist*, yaitu setiap item pengungkapan diberi skor apabila diungkapkan oleh perusahaan dan tidak diberi skor apabila tidak diungkapkan. Penggunaan metode tersebut memungkinkan tingkat pengungkapan emisi karbon dapat diukur secara objektif dan dibandingkan antarperusahaan. Semakin banyak item yang diungkapkan, semakin tinggi tingkat transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai emisi karbon kepada *stakeholder* (Guo, 2022).

Dalam penelitian ini, *Carbon Emission Disclosure* diukur menggunakan *Carbon Emission Disclosure Index* yang dikembangkan oleh Guo (2022). Penggunaan indeks tersebut dinilai sesuai karena mampu menggambarkan tingkat kelengkapan pengungkapan informasi emisi karbon melalui berbagai

aspek yang berkaitan dengan kebijakan, pengelolaan, kinerja, hingga validasi informasi emisi karbon. Oleh karena itu, *Carbon Emission Disclosure Index* digunakan sebagai dasar pengukuran variabel *Carbon Emission Disclosure* dalam penelitian ini (Guo, 2022).

2.1.5 Firm Size

2.1.5.1 Definisi Firm Size

Firm Size merupakan salah satu karakteristik fundamental yang sering digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan untuk menjelaskan perbedaan kapasitas, sumber daya, dan kompleksitas operasional antar perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki akses pendanaan yang lebih luas, sumber daya yang lebih besar, serta kemampuan operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, *Firm Size* sering digunakan sebagai variabel penting dalam menganalisis kinerja keuangan maupun karakteristik perusahaan (Yadav et al., 2021).

Firm Size dipahami sebagai skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan total aset, total penjualan, maupun jumlah tenaga kerja (Setiabudhi 2022). Klasifikasi tersebut menggambarkan kapasitas ekonomi perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Sejalan dengan itu, *Firm Size* juga mencerminkan besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ditunjukkan melalui total aktiva dan volume penjualan dalam suatu periode tertentu (Lestari et al. 2022).

Pendekatan lain menjelaskan bahwa *Firm Size* dapat dilihat dari rata-rata total penjualan bersih selama periode berjalan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (Hidayat dan Khotimah 2022). Dalam penelitian empiris, *Firm Size* sering diproksikan dengan logaritma natural total aset karena dianggap mampu merepresentasikan skala perusahaan secara lebih proporsional dan mengurangi bias perbedaan ukuran yang terlalu ekstrem (Yadav et al., 2021).

Menurut Al-Shammari et al., (2021) mendefinisikan *Firm Size*:

“*Firm Size* merepresentasikan skala operasi dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang umumnya diukur melalui total aset, pendapatan penjualan, atau kapitalisasi pasar untuk menjelaskan perbedaan dalam kinerja perusahaan.”

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Firm Size* merupakan ukuran yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, penjualan, atau indikator ekonomi lainnya yang mencerminkan kapasitas operasional, tingkat kompleksitas usaha, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, *Firm Size* digunakan sebagai variabel yang mencerminkan kekuatan sumber daya dan skala ekonomi perusahaan (Yadav et al., 2021; Aurelia et al., 2022).

2.1.5.2 Klasifikasi *Firm Size*

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar (UMKM) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan aset dan omzet tahunan. Klasifikasi ini penting untuk memahami kapasitas finansial, skala operasional,

dan kemampuan investasi masing-masing kategori usaha. Secara deskriptif, klasifikasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha dengan skala terkecil yang memiliki sumber daya dan kapasitas operasional sangat terbatas. Umumnya, usaha mikro ini berfokus pada kegiatan ekonomi yang sederhana dan memiliki risiko serta eksposur terbatas.

2. Usaha Kecil

Memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding usaha mikro, dengan kemampuan lebih luas untuk melakukan investasi, pengelolaan operasional, dan memenuhi kewajiban administratif.

3. Usaha Menengah

Usaha dengan kapasitas finansial dan operasional lebih luas dibanding usaha kecil, memungkinkan pengelolaan risiko dan investasi yang lebih efektif, serta kemampuan untuk mengimplementasikan strategi bisnis lebih kompleks.

4. Usaha Besar

Memiliki sumber daya yang paling luas, memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi, pengelolaan risiko, serta pencapaian Profitabilitas secara optimal. Perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks dan kemampuan manajemen risiko yang matang.

Tabel 2. 1 Klasifikasi *Firm Size* menurut UU No.20 Tahun 2008

<i>Firm Size</i>	Aset	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 miliar	>Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	> 10 miliar	>Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Dengan demikian, *Firm Size* memberikan dasar teoretis bahwa skala perusahaan dapat memengaruhi kapasitas pengelolaan sumber daya, tingkat pengungkapan informasi, serta kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas. *Firm Size* menjadi indikator penting untuk memahami perbedaan karakteristik, strategi, dan kinerja antar perusahaan, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki tingkat kompleksitas operasional yang tinggi (Yadav et al., 2021).

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat Klasifikasi *Firm Size*

Tujuan dan manfaat dari pengklasifikasian *Firm Size* menurut Yadav et al. (2021) adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai *proxy* atas tingkat ketidakpastian saham. Perusahaan berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat sehingga informasi mengenai prospek perusahaan lebih mudah didapat jika dibandingkan dengan perusahaan skala kecil. Dengan hal ini, maka ketidakpastian terhadap nilai perusahaan menjadi berkurang yang akan membuat tingkat underpricing pun akan semakin rendah seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh.

2. *Firm Size* dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan lindung nilai (*hedging*). Perusahaan berskala besar cenderung akan melaksanakan lindung nilai. Karena semakin besarnya perusahaan, maka risiko yang akan dialami perusahaan semakin besar. Risiko yang dimiliki perusahaan skala besar lebih banyak karena operasional yang dilakukan biasanya tidak hanya mencakup dalam negeri saja, namun juga melakukan transaksi antar negara.

2.1.5.4 Total Aset sebagai Representasi *Firm Size*

Firm Size umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset mencerminkan seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Menurut PSAK 1 (IAI, 2024), aset merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, total aset sering digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan ukuran suatu perusahaan karena menunjukkan besarnya sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan aktivitas operasional.

Menurut Kasmir (2023), total aset terdiri atas dua kelompok utama, yaitu

- a. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat direalisasikan, dijual, atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Aset lancar mencerminkan sumber daya ekonomi yang digunakan perusahaan untuk mendukung aktivitas operasional jangka pendek

1. **Kas dan Setara Kas**, yaitu uang tunai dan investasi jangka pendek yang sangat likuid serta dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.
2. **Piutang Usaha**, yaitu hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi penjualan secara kredit.
3. **Persediaan**, yaitu barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi.
4. **Investasi Jangka Pendek**, yaitu investasi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.
5. **Biaya Dibayar di Muka**, yaitu pembayaran yang telah dilakukan perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi pada periode berikutnya.
6. **Aset Lancar Lainnya**, yaitu aset yang memenuhi kriteria aset lancar tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok aset lancar utama

b. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar merupakan aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional jangka panjang dan tidak diharapkan direalisasikan dalam waktu satu tahun. Aset ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan dalam

menghasilkan manfaat ekonomi pada masa mendatang. Komponen aset tidak lancar meliputi:

1. **Aset Tetap**, yaitu aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan.
2. **Properti Investasi**, yaitu properti yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai aset.
3. **Aset Tak Berwujud**, yaitu aset
4. yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten, merek dagang, lisensi, dan perangkat lunak.
5. **Investasi Jangka Panjang**, yaitu investasi yang dimiliki perusahaan dengan tujuan kepemilikan lebih dari satu tahun.
6. **Aset Pajak Tangguhan**, yaitu aset yang timbul akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak pada periode mendatang.
7. **Aset Tidak Lancar Lainnya**, yaitu aset jangka panjang yang tidak termasuk dalam kelompok aset tetap, investasi, maupun aset tak berwujud.
8. **Aset Eksplorasi dan Evaluasi** (*khusus perusahaan pertambangan*), yaitu aset yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral sebelum memasuki tahap produksi komersial (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024; Kasmir, 2023).

2.1.5.5 Logaritma Natural Total Aset sebagai Dasar Pengukuran *Firm Size*

Dalam penelitian keuangan, *Firm Size* umumnya diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan. Penggunaan logaritma natural bertujuan untuk menyederhanakan data yang memiliki rentang nilai sangat besar, mengurangi perbedaan skala antarperusahaan, serta menghasilkan distribusi data yang lebih stabil sehingga memudahkan proses analisis statistik (Ghozali, 2021).

Penggunaan logaritma natural juga mampu mengurangi pengaruh nilai ekstrem (*outlier*) yang sering muncul pada data total aset perusahaan, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki perbedaan skala aset cukup besar. Dengan demikian, pengukuran menggunakan Ln total aset dapat memberikan hasil yang lebih proporsional dalam menggambarkan ukuran perusahaan dibandingkan menggunakan nilai total aset secara langsung (Purmalastu, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan logaritma natural total aset sebagai representasi *Firm Size* karena mampu menggambarkan besarnya ukuran perusahaan secara lebih proporsional serta mempermudah proses analisis dan perbandingan antarperusahaan. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Purmalastu (2024).

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan perusahaan karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas menunjukkan

efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2021:197).

Menurut Kasmir (2021, hlm. 198), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu serta memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas pada dasarnya mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas penjualan maupun pemanfaatan aset yang dimiliki. Semakin efektif perusahaan dalam mengelola sumber daya dan asetnya, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat profitabilitas yang dicapai.

Sejalan dengan itu, Brigham dan Houston (2021) menjelaskan bahwa:

“profitabilitas merupakan ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari sumber daya yang dimiliki, yang menjadi perhatian utama investor dalam menilai prospek perusahaan di masa depan.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien melalui pengelolaan aset, modal, serta aktivitas operasional perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) karena rasio ini mampu menggambarkan efektivitas

perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih (Kasmir, 2021).

2.1.6.2 Tujuan Profitabilitas

Analisis profitabilitas memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta menilai efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, rasio profitabilitas juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan (Kasmir, 2021).

Menurut Kasmir (2021:197) tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat dari rasio profitabilitas adalah:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Profitabilitas menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* mampu memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan ROA, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki risiko lingkungan tinggi. Dengan demikian, profitabilitas tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga keterkaitan antara aspek lingkungan, karakteristik perusahaan, dan efisiensi pengelolaan aset dalam menciptakan laba (Kasmir, 2021).

2.1.6.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui perbandingan antara pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, mengelola aset secara efisien, serta menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta menilai efektivitas pengelolaan

sumber daya yang dimiliki (Kasmir, 2021).

Dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, digunakan rasio.

Menurut Kasmir (2021:198) bahwa:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan.”

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu:

1. *Gross Profit Margin*

Gross Profit Margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Semakin besar *gross profit margin*, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan

$$\text{Gross Profit Margin (\%)} = \left(\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \right) \times 100$$

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*pure profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

$$\text{Operating Profit Margin (\%)} = \left(\frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \right) \times 100$$

3. *Net Profit Margin (NPM)*

NPM menunjukkan persentase laba bersih terhadap penjualan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan mengelola biaya dan menghasilkan laba dari penjualan.

$$NPM (\%) = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \right) \times 100$$

4. *Return on Assets (ROA)*

ROA menilai efisiensi perusahaan dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi *ROA*, semakin efektif aset digunakan.

$$ROA (\%) = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \right) \times 100$$

5. *Return On Equity*

ROE mengukur laba yang dihasilkan dari modal sendiri (ekuitas). Rasio ini menjadi indikator utama keuntungan bagi pemegang saham.

$$ROE (\%) = \left(\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \right) \times 100\%$$

2.1.6.4 *Return on Assets (ROA)* sebagai Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Salah satu rasio profitabilitas yang paling banyak digunakan untuk mengukur kemampuan tersebut adalah

Return on Assets (ROA). Menurut Kasmir (2023), *Return on Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan.

Menurut Brigham dan Houston (2022), *Return on Assets (ROA)* menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan sehingga mampu menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pada aset perusahaan. Oleh karena itu, ROA sering digunakan oleh investor, kreditor, maupun manajemen sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

Pada perusahaan pertambangan, penggunaan *Return on Assets (ROA)* dinilai lebih tepat dibandingkan rasio profitabilitas lainnya karena sektor ini memiliki karakteristik aset yang besar serta padat modal (*capital intensive*). Aktivitas eksplorasi, pembangunan infrastruktur tambang, serta investasi pada alat berat menyebabkan perusahaan pertambangan memiliki total aset yang relatif tinggi. Oleh karena itu, ROA mampu menggambarkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2023; Brigham & Houston, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan *Return on Assets (ROA)* sebagai pengukuran profitabilitas karena mampu menunjukkan tingkat

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Penggunaan ROA juga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui pengaruh *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* terhadap kemampuan perusahaan pertambangan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.7 Kepemilikan Modal Asing

2.1.7.1 Definisi Kepemilikan Modal Asing

Kepemilikan modal asing (*foreign ownership*) merujuk pada bagian saham atau modal perusahaan yang dimiliki oleh investor atau entitas luar negeri. Struktur kepemilikan ini menunjukkan sejauh mana perusahaan memperoleh investasi dari pihak asing yang dapat memengaruhi keputusan strategis, pengawasan, serta arah operasional perusahaan. Kepemilikan asing tidak hanya menyediakan akses terhadap modal global, tetapi juga membawa praktik tata kelola yang lebih transparan dan ekspektasi kinerja yang tinggi dari investor internasional (Trianjani et al., 2025).

Kepemilikan modal asing dipandang memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Investor asing biasanya menuntut standar tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi informasi yang lebih tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik akuntansi dan pelaporan yang lebih profesional (Syafik, 2025). Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa *foreign ownership* dapat memberikan sinyal positif bagi pasar

dan *stakeholder* lain mengenai kredibilitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya (Jamilah et al., 2025).

Menurut literatur, kepemilikan asing dapat dilihat sebagai mekanisme pengawasan tambahan yang memengaruhi perilaku manajerial. Dengan keterlibatan pemodal asing, perusahaan biasanya terdorong untuk meningkatkan efisiensi, profitabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam hal pengungkapan informasi lingkungan dan sosial (Wulan, 2022).

Dengan demikian, kepemilikan modal asing bukan hanya bentuk investasi finansial, tetapi juga instrumen strategis yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, kualitas tata kelola, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2.1.7.2 Regulasi Kepemilikan Modal Asing di Indonesia

Pengaturan mengenai kepemilikan modal asing di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong investasi yang sehat. Dasar hukum yang menjadi rujukan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur prinsip, hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi investor asing.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar pembentukan badan usaha berbentuk PT, termasuk PT Penanaman Modal Asing (PMA).

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 jo. Perpres Nomor 49 Tahun 2021, yang mengatur bidang usaha terbuka, terbuka dengan persyaratan, maupun memiliki batasan kepemilikan asing.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek, yang secara khusus mengatur kepemilikan asing di sektor pasar modal, termasuk:
 - a. Perusahaan Efek nasional: seluruh saham dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia.
 - b. Perusahaan Efek patungan: saham dimiliki bersama pihak Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan.
 - c. Batas maksimal kepemilikan asing: 85% untuk bidang keuangan selain sekuritas, 99% untuk bidang sekuritas tertentu. Ketentuan ini dapat dikecualikan untuk Penawaran Umum.

Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mendorong investasi asing yang sehat, sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Pemahaman regulasi ini penting karena tingkat kepemilikan modal asing dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan.

2.1.7.3 Kepemilikan Saham Asing sebagai Representasi Kepemilikan Modal Asing

Kepemilikan modal asing menunjukkan besarnya penyertaan modal yang dimiliki oleh investor asing dalam suatu perusahaan. Kepemilikan tersebut mencerminkan tingkat partisipasi pihak asing dalam struktur kepemilikan perusahaan serta menunjukkan keterlibatan investor luar negeri dalam aktivitas

investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam perusahaan yang telah go public, kepemilikan modal asing umumnya direpresentasikan melalui proporsi saham yang dimiliki oleh investor asing terhadap seluruh saham yang beredar. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing, semakin besar pula tingkat kepemilikan modal asing dalam perusahaan. Oleh karena itu, persentase kepemilikan saham asing sering digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan besarnya keterlibatan investor asing dalam perusahaan (Purwaningsih, 2022).

Berdasarkan asal kepemilikannya, kepemilikan saham asing terdiri atas dua kelompok, yaitu:

- a. **Kepemilikan asing institusional** merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau badan usaha asing, seperti perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, maupun lembaga keuangan lainnya yang berasal dari luar negeri. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, sumber daya yang lebih besar, serta tingkat pengawasan yang lebih tinggi terhadap kinerja perusahaan sehingga keberadaannya sering dikaitkan dengan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.

b. **Kepemilikan asing individual** merupakan kepemilikan saham oleh perseorangan yang berkewarganegaraan asing. Investor asing individu melakukan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai saham maupun pembagian dividen. Meskipun proporsinya umumnya lebih kecil dibandingkan investor institusional, kepemilikan asing individu tetap menjadi bagian dari total kepemilikan modal asing perusahaan karena mencerminkan partisipasi investor luar negeri dalam struktur kepemilikan perusahaan.

2.1.7.4 Penggunaan Persentase Kepemilikan Saham Asing sebagai Pengukuran Kepemilikan Modal Asing

Dalam penelitian ini, kepemilikan modal asing diukur menggunakan persentase kepemilikan saham asing terhadap jumlah saham yang beredar. Pengukuran tersebut bertujuan untuk menggambarkan besarnya penguasaan saham perusahaan oleh investor asing secara proporsional. Semakin besar persentase saham yang dimiliki pihak asing, semakin tinggi tingkat kepemilikan modal asing dalam perusahaan (Nguyen et al., 2023).

Penggunaan persentase kepemilikan saham asing sebagai ukuran kepemilikan modal asing telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu karena dinilai mampu menggambarkan tingkat penguasaan investor asing secara proporsional serta memudahkan perbandingan antarperusahaan. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor asing, semakin tinggi tingkat kepemilikan modal asing dalam perusahaan (Nguyen et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham asing sebagai representasi variabel kepemilikan modal asing karena mampu menunjukkan tingkat partisipasi investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan secara objektif dan proporsional. Pengukuran tersebut mengacu pada penelitian Purwaningsih (2022) yang mengukur kepemilikan modal asing berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing terhadap total saham beredar.

2.2 Penelitian terdahulu

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor yang mempengaruhi Profitabilitas yaitu:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lestari & Khafid (2021)	<i>The Effect of GA on FS in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange.</i>	<i>Green Accounting</i> berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan pertambangan.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Green Accounting</i> terhadap ROA pada perusahaan pertambangan.	Hanya menggunakan <i>Green Accounting</i> terhadap ROA.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Ananda & Putri (2024)	Pengaruh <i>GA</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Ekstraktif di Indonesia	<i>GA</i> berpengaruh positif terhadap ROA karena meningkatkan legitimasi dan efisiensi biaya lingkungan.	Sama-sama menguji <i>Green Accounting</i> terhadap ROA pada sektor dengan risiko lingkungan tinggi.	Dilakukan pada perusahaan sektor ekstraktif di Indonesia.
3.	Yona Okterianda, Destia Pentiana, & Nurmalia (2024)	Pengaruh <i>GA</i> dan Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2019–2023.	<i>Green Accounting</i> berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan ROA.	Sama-sama meneliti <i>Green Accounting</i> terhadap ROA pada sektor pertambangan.	Menggunakan kinerja lingkungan sebagai variabel tambahan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Endang Tri Pratiwi, et al. (2025)	<i>Analysis of the Effect of the Implementation of GA and EP on The FS In Manufacturing Companies</i>	<i>Green Accounting</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return On Asset</i> .	Sama – sama menggunakan <i>Green Accounting</i> sebagai variabel utama dan menguji hubungannya dengan <i>ROA</i>	Fokus sektor manufaktur, bukan pertambangan; tidak ada moderator Kepemilikan Modal Asing
5.	Erly Nadila, Johan Ananda Adi Saputra, dan Suryani Yuli Astuti (2025)	Pengaruh <i>Green Accounting</i> , CSR, Kinerja Lingkungan dan <i>Firm Sizet</i> terhadap Kinerja Keuangan	<i>Green Accounting</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>ROA</i> , menunjukkan bahwa biaya lingkungan belum berdampak pada peningkatan laba.	Sama-sama menguji pengaruh <i>Green Accounting</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan	Penelitian menggunakan CSR dan Kinerja Lingkungan sebagai variabel penelitian lainnya.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Sugeng Hariadi & Rifa Mufticha Nurwanda (2024)	Pengaruh CED, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan <i>GA</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening.	<i>Carbon Emission Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap profitabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator ROA.	Penelitian terdahulu menggunakan CSR dan nilai perusahaan sebagai variabel penelitian serta profitabilitas sebagai variabel intervening.
7.	Al-Idris et al. (2025)	Pengaruh <i>GA</i> , <i>EP</i> , dan <i>CED</i> terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024)	<i>Carbon Emission Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan sedangkan <i>GA</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Green Accounting</i> dan <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap profitabilitas perusahaan.	Penelitian terdahulu menggunakan <i>Environmental Performance</i> dan <i>Return on Equity</i> (ROE) pada perusahaan sektor energi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneltian	Persamaan	Perbedaan
8.	Desai et al. (2022)	<i>Impact of carbon emission on Financial Performance: empirical evidence from India</i>	Perusahaan dengan emisi yang lebih tinggi cenderung mengalami penurunan profitabilitas.	Sama-sama menguji pengaruh faktor karbon terhadap <i>FP</i> dan menggunakan indikator profitabilitas sebagai proksi <i>FP</i> .	Berfokus pada dampak langsung intensitas emisi karbon sehingga lebih menekankan pada konsekuensi operasional dari aktivitas produksi.
9.	Fitriani (2025)	<i>Is Profitability Affected By Carbon Emission Disclosure?</i>	Menunjukkan bahwa <i>CED</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur ROA berbasis <i>operating profit</i> , <i>comprehensive profit</i> , dan <i>attributable profit</i> .	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap profitabilitas perusahaan.	Menggunakan modifikasi ROA berbasis <i>operating profit</i> , <i>comprehensive profit</i> , dan <i>attributable profit</i> pada seluruh perusahaan yang terdaftar di IDX.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneltian	Persamaan	Perbedaan
10.	Alsaifi et al. (2020)	<i>Carbon Disclosure and Financial Performance: UK Environmental Policy</i>	Menunjukkan bahwa <i>CED</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan karena mampu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan investor.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap profitabilitas perusahaan.	Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan di Inggris dengan fokus pada kebijakan lingkungan UK
11.	Yadav, Pahi & Gangakhedkar (2021)	<i>The Nexus Between Firm Size, Growth and Profitability: New Panel Data Evidence from Asia-Pacific Markets</i>	<i>FS</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas jangka panjang, <i>diseconomies of scale</i> pada perusahaan yang lebih besar.	Sama-sama menguji pengaruh <i>FS</i> terhadap profitabilitas menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel.	Berfokus pada hubungan non-linear <i>FS</i> , profitabilitas pada perusahaan Asia-Pasifik tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneltian	Persamaan	Perbedaan
12.	Fajar et al. (2025)	Pengaruh Leverage, <i>Firm Size</i> , Struktur Modal Terhadap <i>Financial Performance</i> Perusahaan (Studi pada Perusahaan Tambang Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di ISSI Tahun 2020-2023)	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.	Sama-sama menguji <i>Firm Size</i> terhadap ROA pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	Fokus terhadap sub sektor batu bara dan menggunakan analisis SPSS regresi linier berganda
13.	Nguyen et al. (2023)	<i>Firm Characteristics and Profitability: Evidence from ASEAN Mining Companies</i>	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan di ASEAN.	Sama-sama meneliti <i>Firm Size</i> terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan.	Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan ASEAN secara umum tanpa variabel moderasi.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
14.	Aurelia et al. (2022)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan.	menggunakan kinerja lingkungan, biaya lingkungan, dan <i>leverage</i> sebagai variabel independen
15.	Wage et al. (2021)	Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan UP terhadap Profitabilitas Perusahaan di BEI.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Firm Size</i> berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap profitabilitas perusahaan.	Menggunakan variabel likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas pada seluruh perusahaan di BEI.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
16.	Brilliani, B., Honggowati, S., & Budiwati, C. (2023)	<i>Voluntary Disclosure: The Role of Institutional Ownership as a Moderating Variable Between Carbon Emission Disclosure to FP</i>	<i>Carbon Emission Disclosure</i> berpengaruh negatif terhadap ROA dan dimoderasi oleh <i>institutional ownership</i>	Menguji <i>Carbon Emission Disclosure</i> terhadap <i>Financial Performance</i> (regresi panel) Pada perusahaan pertambangan	Menggunakan <i>institutional ownership</i> sebagai moderator bukan kepemilikan modal asing
17.	Anggara et al. (2021)	<i>Implication of Environmental Management System and Environmental Performance on FP of Entities with Foreign Ownership as Moderator.</i>	menunjukkan Kepemilikan modal asing mampu memoderasi secara positif pengaruh <i>environmental performance</i> terhadap yang ROA.	Sama-sama menggunakan kepemilikan modal asing sebagai variabel moderasi terhadap profitabilitas perusahaan	Menggunakan <i>Environmentl Management System</i> (EMS) dan <i>environmental performance</i> pada perusahaan manufaktur.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
18.	Rahman et al. (2023)	<i>Environmental Disclosures and Corporate Attributes, from the Lens of Legitimacy Theory: A Longitudinal Analysis on a Developing Country.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap kinerja dan legitimasi perusahaan.	Sama-sama membahas pengungkapan lingkungan dan kaitannya dengan kinerja perusahaan.	Berfokus pada <i>environmental disclosure</i> secara umum berdasarkan <i>Legitimacy Theory</i> .
19.	Arya Raqli Purmalastu (2024)	<i>Green Accounting as a Pure Moderation: Foreign ownership on Financial Performance.</i>	Kepemilikan Modal Asing berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan <i>Green Accounting</i> memperkuat sebagai moderator.	Sama-sama menggunakan kepemilikan modal asing terkait <i>Financial Performance</i> dengan elemen <i>Green Accounting</i>	<i>Green Accounting</i> sebagai moderator Kepemilikan Modal Asing, bukan variabel independen

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
20.	Bose et al. (2024)	<i>Do Foreign Institutional Investors Influence Corporate Climate Change Disclosure Quality? International Evidence</i>	Foreign institutional ownership berpengaruh positif terhadap kualitas climate change disclosure yang berdampak pada peningkatan firm valuation.	Sama-sama membahas pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan	Berfokus pada <i>climate change disclosure quality</i> dan <i>firm valuation</i> pada perusahaan lintas negara
21	Nia Febriani Putri & Khomsiyah (2024)	Pengaruh GA, Kinerja Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan (Profitabilitas sebagai Variabel Intervening)	<i>Green Accounting</i> berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Green Accounting</i> terhadap Profitabilitas dengan indikator ROA.	Penelitian terdahulu menggunakan kinerja lingkungan, CSR, dan nilai perusahaan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
22	Mohamad Yudha Al Idris, Fitrini Mansur, & Riski Hernando (2023)	The Influence of GA, Environmental Performance, and <i>Carbon Emission Disclosure</i> on Profitability	<i>Carbon Emission Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>CED</i> terhadap Profitabilitas dengan menggunakan indikator CEDI	Penelitian terdahulu menggunakan <i>Environmental Performance</i> sebagai variabel independen.
23	Ailsa Belinda Leilani & Sari Andayani (2023)	Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan	<i>Carbon Emission Disclosure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.	Sama-sama meneliti <i>Carbon Emission Disclosure</i> sebagai variabel independen.	Penelitian terdahulu menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen,
24	Arsy Nurulita Mustafa & Erna Sulistyowati (2023)	Pengaruh CAR, NPL, LDR, dan <i>Firm Size</i> terhadap Profitabilitas BUMN Sektor Perbankan	<i>Firm Size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Firm Size</i> ($\ln$ <i>Total Assets</i>) terhadap Profitabilitas	Menggunakan CAR, NPL, dan LDR sebagai variabel independen.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
25.	Sunarto Wage, Hariya Toni, & Rahmat (2024)	Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia	<i>Firm Size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas.	Sama-sama meneliti pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap Profitabilitas dengan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Ln (<i>Total Assets</i>).	Penelitian terdahulu menggunakan Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas sebagai variabel independen.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh *Green Accounting* terhadap Profitabilitas

Green Accounting merupakan penerapan akuntansi yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan melalui identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan. Pada perusahaan pertambangan, penerapan *Green Accounting* menjadi penting karena aktivitas operasional perusahaan

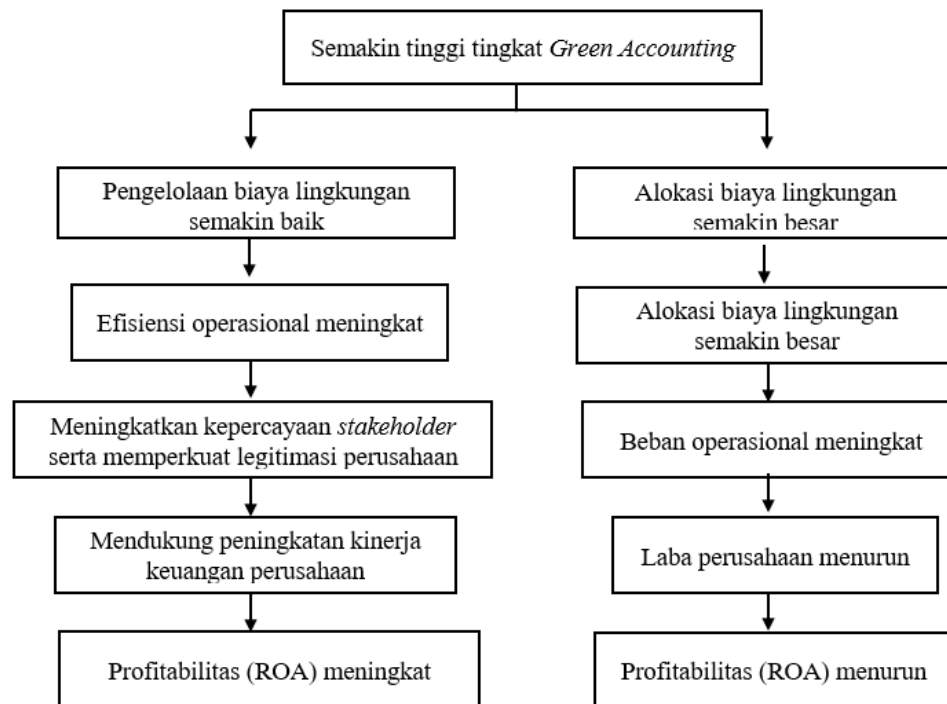
berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besar, seperti pencemaran, limbah,

dan kerusakan lahan. Pengelolaan biaya lingkungan yang dilakukan secara efektif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko lingkungan, serta mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Husnatarina, 2024; Ginting, 2025).

Namun demikian, penerapan *Green Accounting* juga berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan. Pada perusahaan pertambangan, implementasi *Green Accounting* memerlukan berbagai pengeluaran, seperti biaya reklamasi, rehabilitasi lahan pascatambang, pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, serta biaya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Pengeluaran tersebut dapat meningkatkan beban operasional perusahaan sehingga mengurangi laba, terutama apabila manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan belum dapat dirasakan dalam jangka pendek (Husnatarina, 2024; Ginting, 2025).

Dalam perspektif *Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory*, perusahaan dituntut untuk memenuhi harapan stakeholder serta memperoleh legitimasi sosial melalui penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Upaya tersebut memerlukan investasi dan pengeluaran biaya lingkungan yang relatif besar sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan (Freeman, 1984; Suchman, 1995). Apabila biaya lingkungan yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari

aset yang dimiliki dapat menurun sehingga profitabilitas perusahaan juga berpotensi mengalami penurunan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran *Green Accounting* berpengaruh terhadap Profitabilitas

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai hubungan antarvariabel, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: *Green Accounting* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

2.3.2 Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas

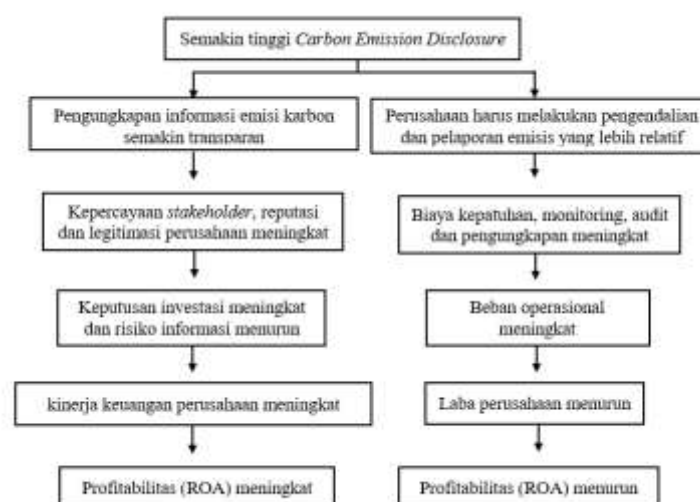
Carbon Emission Disclosure merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya. Pada perusahaan pertambangan, pengungkapan tersebut penting karena aktivitas operasional memiliki potensi menghasilkan emisi yang relatif tinggi. Melalui pengungkapan emisi karbon, perusahaan menunjukkan akuntabilitas terhadap dampak lingkungan sekaligus komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Rizki Aulia et al., 2021).

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi stakeholder melalui penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel (Freeman, 1984). Sementara itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengungkapan informasi yang relevan (Suchman, 1995). Semakin baik *Carbon Emission Disclosure* yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan stakeholder, sehingga mampu meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan dengan investor, serta mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan.

Namun demikian, *Carbon Emission Disclosure* juga berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan. Pengungkapan emisi karbon memerlukan proses pengukuran, monitoring, verifikasi, serta penyusunan laporan yang membutuhkan biaya tambahan. Pada perusahaan pertambangan, biaya tersebut dapat menjadi lebih besar karena tingginya aktivitas operasional dan

kompleksitas pengelolaan emisi. Apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek, maka laba perusahaan dapat menurun sehingga profitabilitas juga berpotensi mengalami penurunan (Rizki Aulia et al., 2021).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap profitabilitas. Fitriani (2025), Alsaifi et al. (2020), dan Desai et al. (2022) menemukan bahwa *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena mampu meningkatkan legitimasi perusahaan, memperkuat reputasi, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder. Sebaliknya, Shafira (2024) menemukan bahwa *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh negatif karena pengungkapan emisi karbon dapat dipersepsikan sebagai indikasi meningkatnya risiko lingkungan, biaya operasional, serta tekanan regulasi yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan perusahaan.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai hubungan antarvariabel, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

2.3.2 Pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas

Firm Size menggambarkan besar kecilnya kapasitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, kapasitas operasional yang lebih luas, akses pendanaan yang lebih baik, serta kemampuan manajerial yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Pada perusahaan pertambangan, ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan mengelola aset dan aktivitas operasional secara lebih efektif sehingga berpotensi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2021; Yadav et al., 2021).

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan yang berukuran besar menghadapi tuntutan yang lebih tinggi dari investor, pemerintah, kreditur, dan masyarakat untuk mempertahankan kinerja perusahaan secara berkelanjutan (Freeman, 1984). Selain itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk mempertahankan legitimasi sosial karena aktivitas operasionalnya lebih banyak memperoleh perhatian dari masyarakat maupun regulator (Suchman, 1995). Dengan sumber daya dan

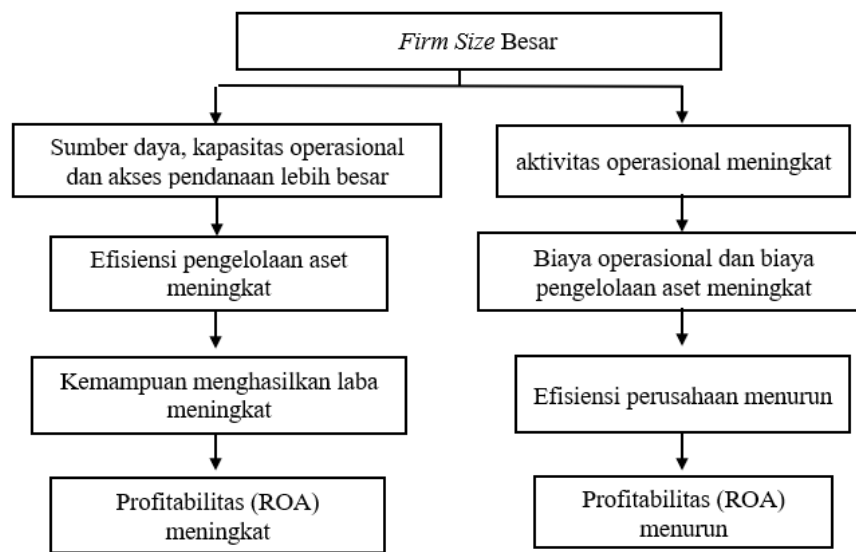
kapasitas yang lebih besar, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat kepercayaan stakeholder sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat (Freeman et al., 2021; Harrison et al., 2021; Rehman et al., 2023).

Namun demikian, *Firm Size* juga berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kompleksitas aktivitas operasional, pengelolaan aset, dan koordinasi organisasi yang harus dilakukan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional dan administrasi sehingga berpotensi mengurangi laba apabila tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi (Yadav et al., 2021). Dalam perspektif *Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory*, perusahaan besar juga dituntut memenuhi harapan stakeholder serta mempertahankan legitimasi sosial yang memerlukan biaya relatif besar. Apabila peningkatan biaya tersebut lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menurun sehingga profitabilitas perusahaan juga berpotensi mengalami penurunan (Freeman, 1984; Suchman, 1995).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam mengenai pengaruh *Firm Size* terhadap profitabilitas. Fajar et al. (2025) dan Nguyen et al. (2023) menemukan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas karena perusahaan yang berukuran besar mampu memanfaatkan sumber daya, aset, dan akses pendanaan secara lebih optimal sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebaliknya, Yadav, Pahi, dan Gangakhedkar (2021) serta Aurelia et al. (2022) menemukan bahwa *Firm*

Size berpengaruh negatif terhadap profitabilitas akibat meningkatnya biaya operasional dan terjadinya *diseconomies of scale*, yaitu kondisi ketika peningkatan ukuran perusahaan menyebabkan biaya meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan uraian tersebut, *Firm Size* memiliki potensi memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Pengaruh positif terjadi apabila perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya, aset, dan kapasitas operasional yang dimiliki sehingga meningkatkan efisiensi serta kemampuan menghasilkan laba. Sebaliknya, pengaruh negatif dapat terjadi apabila peningkatan ukuran perusahaan diikuti oleh meningkatnya kompleksitas operasional dan biaya yang lebih besar daripada manfaat ekonomi yang diperoleh. Oleh karena itu, hubungan *Firm Size* terhadap profitabilitas masih memerlukan pembuktian empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai hubungan antarvariabel, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3 : *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap signifikan Profitabilitas.

2.3.3 Pengaruh *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* secara simultan terhadap Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset, operasional, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pada sektor pertambangan, profitabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas produksi dan harga komoditas, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, menjaga

transparansi informasi keberlanjutan, serta mengoptimalkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Oleh karena itu, *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* dipandang sebagai faktor yang memiliki keterkaitan terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)*.

Green Accounting membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola biaya lingkungan yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan. Penerapan *Green Accounting* dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan biaya lingkungan dan mengurangi risiko sanksi lingkungan. Sementara itu, *Carbon Emission Disclosure* menjadi bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi emisi karbon dan kebijakan lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholder*. Selain itu, *Firm Size* mencerminkan besarnya kapasitas perusahaan dalam mengelola aset, sumber daya, teknologi, dan pendanaan untuk mendukung efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dalam perspektif *Stakeholder Theory*, perusahaan dituntut untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* seperti investor, pemerintah, masyarakat, dan kreditur melalui praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Freeman et al., 2021; Harrison et al., 2021). Penerapan *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* menjadi bentuk respons perusahaan terhadap tekanan *stakeholder* terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung

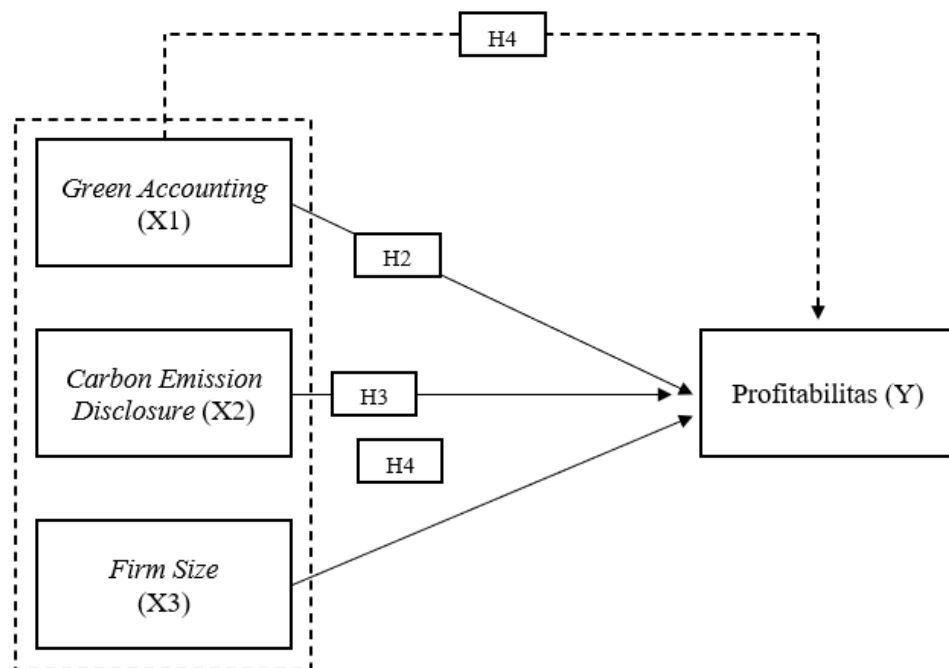
memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi tuntutan *stakeholder* karena memiliki sumber daya dan kapasitas operasional yang lebih memadai. Pemenuhan ekspektasi *stakeholder* tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan investor, serta mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan.

Selain *Stakeholder Theory*, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan perlu menjaga kesesuaian aktivitas operasionalnya dengan norma dan ekspektasi sosial agar memperoleh legitimasi dari masyarakat dan regulator. Pada sektor pertambangan yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi, penerapan *Green Accounting* dan *Carbon Emission Disclosure* menjadi strategi perusahaan dalam mempertahankan legitimasi sosial dan mengurangi tekanan lingkungan (Rehman et al., 2023). Perusahaan besar juga cenderung menghadapi sorotan publik yang lebih tinggi sehingga terdorong untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dan transparansi lingkungan guna menjaga legitimasi perusahaan. Dengan adanya legitimasi sosial dan dukungan *stakeholder*, perusahaan berpotensi memperoleh stabilitas operasional dan peningkatan profitabilitas dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* memiliki hubungan terhadap profitabilitas perusahaan, meskipun hasil penelitian masih menunjukkan inkonsistensi. Lestari dan Khafid (2021) serta Pratiwi et al. (2025) menemukan bahwa *Green Accounting* berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Nadila et al. (2025)

menunjukkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pada variabel *Carbon Emission Disclosure*, Fitriani (2025) dan Alsaifi et al. (2020) menemukan pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan Hariadi dan Nurwanda (2024) menemukan bahwa *Carbon Emission Disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selain itu, Fajar et al. (2025) dan Nguyen et al. (2023) menunjukkan bahwa *Firm Size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan Yadav et al. (2021) dan Aurelia et al. (2022) menemukan pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, *Green Accounting*, *Carbon Emission Disclosure*, dan *Firm Size* dipandang memiliki hubungan secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan karena ketiga variabel tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola lingkungan, menjaga transparansi informasi, serta memanfaatkan kapasitas sumber daya perusahaan secara efektif. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih perlu diuji kembali, khususnya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



Gambar 2. 4 Model Penelitian

Secara Parsial = —————→

Secara Simultan = - - - - -→

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai hubungan antarvariabel, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4 : *Green Accounting, Carbon Emission Disclosure* dan *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap signifikan Profitabilitas.

2.3.4 Pengaruh *Green Accounting* terhadap profitabilitasnya yang dimoderasi oleh Kepemilikan Modal Asing

Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang mengubah kekuatan maupun arah hubungan tersebut. Baron dan Kenny (1986) mendefinisikan variabel moderasi sebagai variabel yang memengaruhi arah maupun kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

"A moderator is a qualitative or quantitative variable that affects the direction and/or strength of the relation between an independent or predictor variable and a dependent or criterion variable."

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, baik internal maupun eksternal. Dalam perkembangan literatur modern, *Stakeholder Theory* menekankan pentingnya perusahaan menjaga hubungan yang seimbang dengan stakeholder guna menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan keberlanjutan usaha (Freeman et al., 2021; Harrison et al., 2021). Pada perusahaan pertambangan, investor asing merupakan salah satu stakeholder strategis yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan, khususnya dalam mendorong penerapan tata kelola perusahaan, transparansi informasi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Kepemilikan modal asing tidak hanya memberikan akses terhadap sumber pendanaan global, tetapi juga membawa standar tata kelola, akuntabilitas, dan

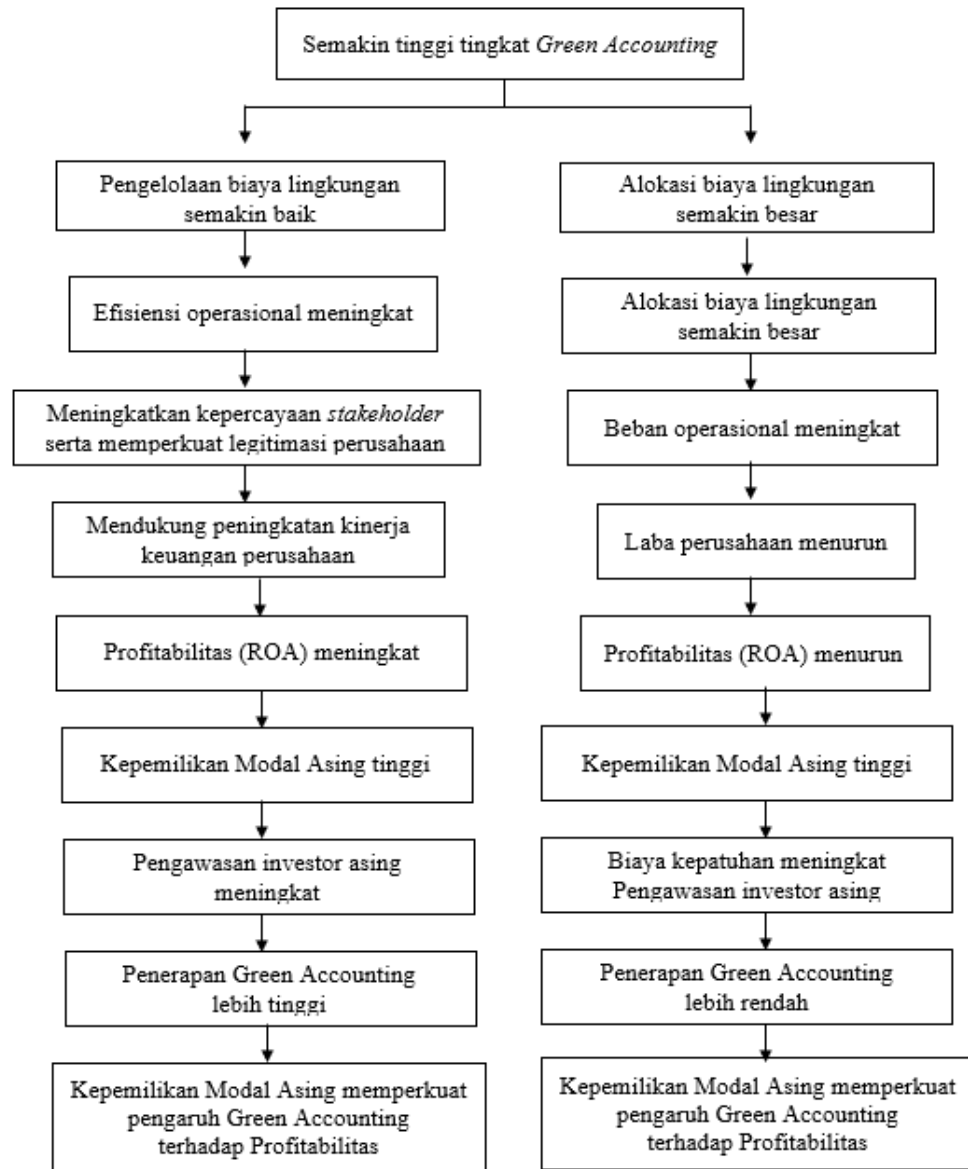
keberlanjutan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan proporsi kepemilikan asing yang besar cenderung lebih terdorong untuk menerapkan *Green Accounting* secara efektif. Penerapan *Green Accounting* yang didukung oleh pengawasan investor asing diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan, memperkuat kepercayaan stakeholder, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Bose et al., 2024).

Selain itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan perlu mempertahankan legitimasi sosial dengan menyesuaikan aktivitas operasionalnya terhadap norma dan harapan masyarakat (Suchman, 1995). Kehadiran investor asing meningkatkan tuntutan terhadap perusahaan untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan agar lebih konsisten dalam mengelola biaya lingkungan, meningkatkan transparansi, dan mempertahankan reputasi perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan modal asing secara teoritis diperkirakan dapat memperkuat pengaruh *Green Accounting* terhadap profitabilitas.

Di sisi lain, kepemilikan modal asing juga berpotensi memperlemah pengaruh *Green Accounting* terhadap profitabilitas. Investor asing umumnya menuntut standar lingkungan dan tata kelola yang lebih tinggi sehingga perusahaan perlu mengalokasikan biaya lingkungan yang lebih besar untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Apabila peningkatan biaya lingkungan tersebut belum mampu memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, maka laba

perusahaan dapat menurun sehingga pengaruh *Green Accounting* terhadap profitabilitas menjadi lebih lemah. Hal ini sejalan dengan konsep moderasi Baron dan Kenny (1986) yang menyatakan bahwa variabel moderasi dapat mengubah kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Meskipun penelitian yang secara langsung menguji Kepemilikan Modal Asing sebagai variabel moderasi pada hubungan *Green Accounting* terhadap profitabilitas masih terbatas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan modal asing berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola dan praktik keberlanjutan perusahaan. Anggara et al. (2021) menemukan bahwa kepemilikan modal asing mampu memperkuat pengaruh *environmental performance* terhadap *Return on Assets* (ROA). Purmalastu (2024) juga menunjukkan bahwa kepemilikan modal asing berkaitan dengan praktik *Green Accounting* dan peningkatan *financial performance*. Temuan tersebut menjadi dasar teoritis bahwa kepemilikan modal asing diduga memiliki peran dalam memoderasi hubungan antara *Green Accounting* dan Profitabilitas.



Gambar 2. 5 Kerangka Pemikiran Pengaruh *Green Accounting* terhadap Profitabilitas yang dimoderasi Kepemilikan Modal Asing

Berdasarkan uraian tersebut, Kepemilikan Modal Asing diduga memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Green Accounting* dan profitabilitas perusahaan. Secara teoritis, keberadaan Kepemilikan Modal Asing diperkirakan dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut melalui peningkatan tata kelola perusahaan, transparansi, serta pengawasan terhadap praktik pengelolaan lingkungan. Namun demikian, besarnya pengaruh moderasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 5 : Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Green Accounting* terhadap Profitabilitas.

2.3.5 Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas yang dimoderasi Kepemilikan Modal Asing

Hubungan antara *Carbon Emission Disclosure* dan profitabilitas diperkirakan dipengaruhi oleh keberadaan Kepemilikan Modal Asing sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang mengubah kekuatan maupun arah hubungan tersebut. Baron dan Kenny (1986) mendefinisikan variabel moderasi sebagai variabel yang memengaruhi arah maupun kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

"A moderator is a qualitative or quantitative variable that affects the direction and/or strength of the relation between an independent or predictor variable and a dependent or criterion variable.").

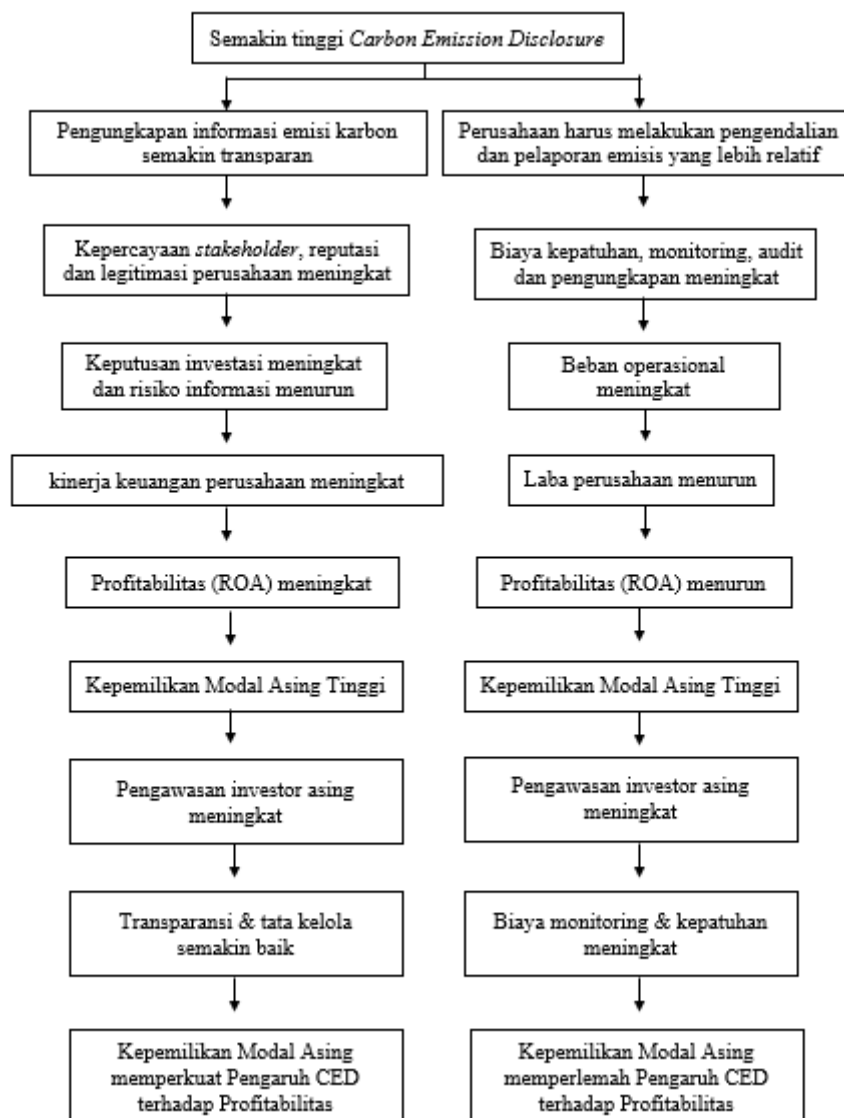
Berdasarkan *Stakeholder Theory*, investor asing merupakan salah satu stakeholder strategis yang memiliki perhatian tinggi terhadap transparansi informasi, tata kelola perusahaan, serta praktik keberlanjutan (Freeman, 1984; Freeman et al., 2021). Kehadiran investor asing mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon agar informasi yang disampaikan lebih lengkap, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat reputasi perusahaan, serta mendukung peningkatan kinerja keuangan. Dengan demikian, kepemilikan modal asing secara teoritis diperkirakan mampu memperkuat hubungan antara *Carbon Emission Disclosure* dan profitabilitas.

Selain itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui pemenuhan harapan masyarakat terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan (Suchman, 1995). Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan asing lebih besar umumnya menghadapi tuntutan legitimasi yang lebih tinggi sehingga terdorong untuk meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon. Peningkatan transparansi tersebut diharapkan mampu memperkuat citra perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Penelitian Bose et al. (2024) menunjukkan bahwa *foreign institutional ownership* berpengaruh positif terhadap kualitas *climate change disclosure*, yang mengindikasikan bahwa investor asing mampu mendorong perusahaan meningkatkan transparansi informasi lingkungan. Sementara itu, Shafira (2024) menemukan bahwa *Carbon Emission Disclosure* dapat dipersepsikan investor sebagai indikasi meningkatnya risiko lingkungan dan potensi biaya operasional yang lebih besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan modal asing berpotensi memengaruhi hubungan antara *Carbon Emission Disclosure* dan profitabilitas, bergantung pada keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan transparansi lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kepemilikan Modal Asing diduga memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Carbon Emission Disclosure* dan profitabilitas perusahaan. Secara teoritis, keberadaan Kepemilikan Modal Asing diperkirakan dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut melalui peningkatan tata kelola perusahaan, transparansi informasi, serta pengawasan terhadap praktik pengungkapan emisi karbon. Namun demikian, besarnya pengaruh moderasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 6: Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas.



Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran Kepemilikan Modal Asing Pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas

2.3.7 Pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas yang dimoderasi

Kepemilikan Modal Asing

Hubungan antara *Carbon Emission Disclosure* dan profitabilitas diperkirakan dipengaruhi oleh keberadaan Kepemilikan Modal Asing sebagai variabel

moderasi. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak selalu bersifat langsung, tetapi dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang mengubah kekuatan maupun arah hubungan tersebut. Baron dan Kenny (1986) mendefinisikan variabel moderasi sebagai variabel yang memengaruhi arah maupun kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan *Stakeholder Theory*, investor asing merupakan salah satu stakeholder strategis yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan pengelolaan perusahaan (Freeman, 1984; Freeman et al., 2021). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aset, sumber daya, serta kapasitas operasional yang lebih besar. Apabila perusahaan juga memiliki proporsi kepemilikan modal asing yang tinggi, investor asing dapat meningkatkan fungsi pengawasan (*monitoring*) dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Kondisi tersebut diperkirakan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan sehingga hubungan antara *Firm Size* dan profitabilitas menjadi lebih kuat.

Selain itu, *Legitimacy Theory* menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan legitimasi sosial karena aktivitas operasionalnya lebih banyak mendapat perhatian dari masyarakat, regulator, maupun investor (Suchman, 1995). Kehadiran investor asing mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan perusahaan agar tetap memperoleh kepercayaan

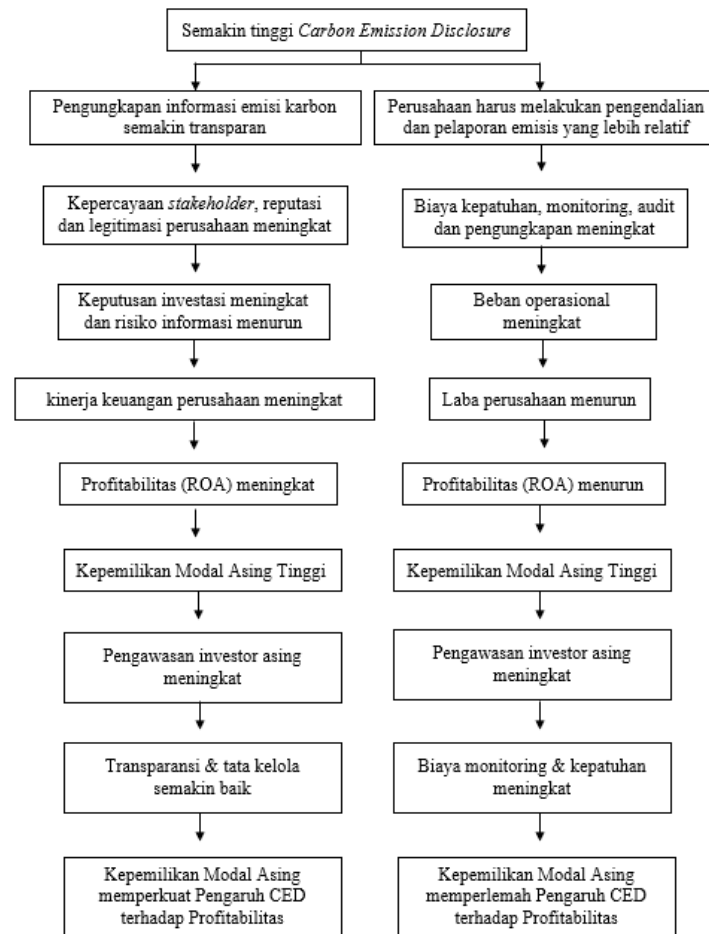
stakeholder. Dengan demikian, kepemilikan modal asing secara teoritis diperkirakan dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan ukuran perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas.

Namun demikian, kepemilikan modal asing juga berpotensi memperlemah hubungan antara *Firm Size* dan profitabilitas. Investor asing umumnya menerapkan standar tata kelola, pengawasan, dan pelaporan yang lebih tinggi sehingga perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pada perusahaan yang berukuran besar, biaya koordinasi, administrasi, dan pengelolaan organisasi juga cenderung lebih tinggi. Apabila peningkatan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau efisiensi operasional, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menurun sehingga hubungan antara *Firm Size* dan profitabilitas menjadi lebih lemah.

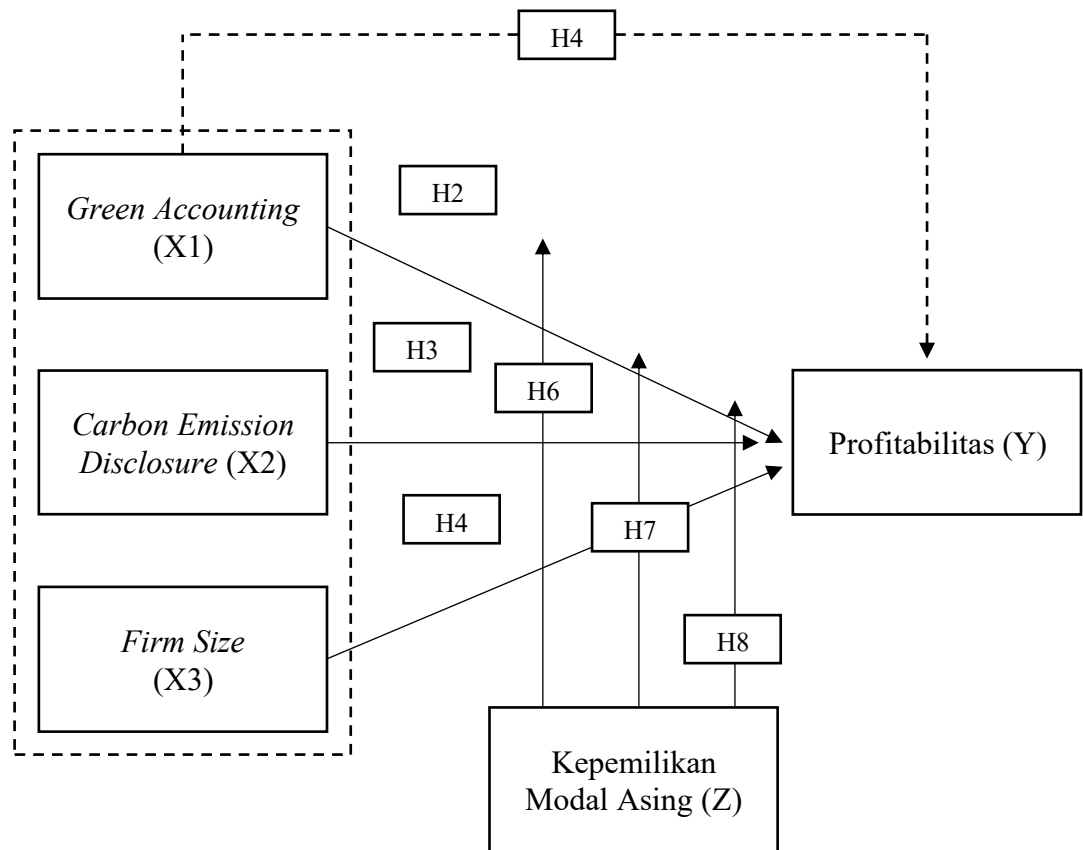
Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian yang secara langsung menguji Kepemilikan Modal Asing sebagai variabel moderasi pada hubungan *Firm Size* terhadap Profitabilitas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dugaan moderasi dalam penelitian ini dibangun berdasarkan konsep variabel moderasi Baron dan Kenny (1986), *Stakeholder Theory*, dan *Legitimacy Theory*. Secara teoritis, kepemilikan modal asing diperkirakan dapat memengaruhi kekuatan hubungan antara *Firm Size* dan profitabilitas melalui peningkatan fungsi monitoring, kualitas tata kelola perusahaan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, Kepemilikan Modal Asing diduga memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *Firm Size* dan profitabilitas perusahaan. Secara teoritis, keberadaan Kepemilikan Modal Asing diperkirakan dapat memengaruhi kekuatan hubungan tersebut melalui peningkatan tata kelola perusahaan, efektivitas pengelolaan aset, serta pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Namun demikian, besarnya pengaruh moderasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 7: Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas.



Gambar 2. 7 Kerangka Pemikiran Kepemilikan Modal Asing memoderasi Pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas



Gambar 2.8 Model Penelitian

Secara Parsial = —————>

Secara Simultan = - - - - ->

2.4 Hipotesis

Penelitian berdasarkan kajian pustakadan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : *Green Accounting* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
- Hipotesis 2 : *Carbon Emission Disclosure* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.
- Hipotesis 3 : *Firm Size* berpengaruh signifikan terhadap signifikan Profitabilitas.
- Hipotesis 4 : *Green Accounting, Carbon Emission Disclosure* dan *Firm Size* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Profitabilitas.
- Hipotesis 5 : Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Green Accounting* terhadap Profitabilitas.
- Hipotesis 6 : Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Carbon Emission Disclosure* terhadap Profitabilitas.
- Hipotesis 7 : Kepemilikan Modal Asing memoderasi secara signifikan pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas.